

# **PENERAPAN KODE ETIK ADVOKAT SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KETAHANAN MORAL PROFESI ADVOKAT**

**Wiwin Yulianingsih**

Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

## **ABSTRAK**

*Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting, karena kode etik itu dipakai sebagai pedoman oleh profesi hukum dalam melaksanakan profesinya. Dan kode etik selalu berkaitan dengan etika dan moral suatu profesi. Dan merupakan salah satu bentuk ketahanan moral bagi profesi. Karena didalam kode etik profesi diatur apa yg boleh, wajib dan dillarang bagi suatu profesi, terutama profesi hukum, khususnya profesi sebagai advokat.*

*Kode etik advokat diberlakukan bagi profesi advokat, dan merupakan pedoman bagi profesi advokat dalam melaksanakan profesinya. Dalam kode etik advokat tercantum etika dan moral yang harus di patuhi oleh advokat. Tentang penerapan kode etik advokat yang dipakai sebagai salah bentuk ketahanan moral profesi advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut didalam masyarakat, bagaimana penegakan dan penerapan kode etik tersebut dan juga kelemahan-kelemahan dari kode etik advokat.*

**Kata kunci :** Penerapan kode etik advokat, ketahanan moral profesi advokat

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Dalam kaitannya dengan kata etika tersebut, Bartens menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *to etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.

James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan "kebenaran" atau "kesalahan" dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.

Sementara itu, menurut Surahwardi K. Lubis, dalam istilah Latin, *ethos* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos*, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Namun demikian, apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas, perkataan etika dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering

dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatan nyata. Lebih lanjut Suhrawardi K. Lubis menyatakan, bahwa dalam bahasa agama Islam, istilah etika ini merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukanlah sekadar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan yang lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah.

Beranjak dari pengertian etika dari beberapa pakar tersebut, maka menurut A. Sonny Keraf etika dipahami dalam pengertian moralitas sehingga mempunyai pengertian yang jauh lebih luas. Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam sistem situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret

1). Etika bersifat absolut, tidak dapat ditawar-tawar, misalnya jangan mencuri, jangan membunuh. Etiket bersifat relatif, yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan dapat saja dianggap sopan oleh kebudayaan lain. Contoh, memegang kepala orang lain di Indonesia tidak sopan, sedang di Amerika biasa saja.

2). Etika memandang manusia dari segi dalam (batiniah), orang yang bersikap etis adalah orang yang benar-benar baik, sifatnya tidak munafik. Etiket memandang manusia dari segi luar (lahiriah), tampaknya dari luar sangat sopan dan hales, tetapi di dalam dirinya penuh kebusukan dan kemunafikan.

Dalam hubungan hidup bermasyarakat, setiap manusia berpegang pada kaidah moral sebagai acuan dalam berperilaku. Kaidah moral ini dapat dijelma dalam kaidah sosial yang menjadi cermin setiap perbuatan hidup bermasyarakat, yang disebut dengan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini harus dihargai dan dipatuhi secara sadar oleh setiap anggota masyarakat. Karena tujuan hidup bermasyarakat adalah agar terpeliharanya ketertiban, kestabilan, dan kebahagiaan berdasarkan hukum kebiasaan.

Kata "moral" memiliki arti (1) ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila; (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan. "

Beranjak dari pengertian moral di atas, pada prinsipnya moral merupakan alat penuntun, pedoman sekaligus alat kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia. Seorang manusia yang tidak memfungsikan dengan sempurna moral yang telah ada dalam diri manusia yang tepatnya berada dalam hati, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang akan selalu melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang sesat. Dengan demikian, manusia tersebut telah merendahkan martabatnya sendiri.

Sejalan dengan pengertian moral sebagaimana disebutkan di atas, Bartens sebagaimana dikutip oleh Kadir Muhammad, mengatakan bahwa kata yang sangat dekat dengan "*etika*" adalah "*moral*". Kata ini berasal dari bahasa latin "*mos*", jamaknya "*mores*" yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaananya hanya pada bahasa asalnya, *etika* berasal dari bahasa Yunani, sedangkan *moral* berasal dari bahasa Latin."

Dengan merujuk pada arti kata etika yang sesuai, maka arti kata moral sama dengan arti kata etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi organ seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. " berbicara mengenai tingkah

laku seseorang, maka ini pula berkaitan dengan kesadaran yang harus dijalankan oleh seseorang dalam memaknai dirinya, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kata kunci pada moral terletak pada pengelolaan kesadaran moral. Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Drijakara bahwa kesadaran moral adalah kesadaran manusia tentang diri sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri dalam berhadapan dengan baik-buruk. Dalam hal ini manusia dapat membedakan antara yang halal dan yang Karam, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, meskipun dapat dilakukan.

Pada prinsipnya manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki sikap yang baik, namun dalam perjalanan hidupnya akan mengalami suatu proses pasang surut, sehingga manusia itu akan terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan demikian, manusia yang masih memiliki akhlak yang baik, dapat dikatakan masih memiliki moral yang baik. Dalam tataran terminologi agama dan filsafat, orang yang memiliki moral yang baik, wring diistilahkan dengan kata masih memiliki "moralitas" yang baik. Liliana Tedjosaputro membagi moralitas ke dalam dua bagian, yakni (1) moralitas dapat bersifat intrinsik, berasal dari diri manusia itu sendiri sehingga perbuatan manusia itu baik atau buruk terlepas atau tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada. Moralitas intrinsik ini esensinya terdapat dalam perbuatan diri manusia itu sendiri; (2) moralitas yang bersifat ekstrinsik penilaiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat perintah ataupun larangan. Moralitas yang bersifat ekstrinsik ini merupakan realitas bahwa manusia itu terikat pada nilai-nilai atau norma-norma yang diberlakukan dalam kehidupan bersama.

Namun pada sisi lain, Immanuel Kant sebagaimana yang diterjemahkan oleh Lili Tjahjadi, membedakan moralitas menjadi dua": (1) moralitas hetronom, sikap di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku sendiri, misalnya karena mau mencapai tujuan yang diinginkan ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi tugas kewajiban itu; (2) moralitas otonom, kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai suatu yang dikehendaknya sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik. Di dalam moralitas otonom, orang mengikuti dan menerima hukum bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya ataupun lantaran takut pada penguasa, melainkan karena itu dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik. Moralitas demikian menurut Kant disebut sebagai otonom kehendak (*autonomic des willes*) yang merupakan prinsip tertinggi moralitas, sebab itu berkaitan dengan kebebasan, hal yang hakiki dari tindakan makhluk rasional atau manusia.

Sementara itu, Sumaryono mengemukakan tiga faktor penentu moralitas perbuatan manusia, yaitu:

- a) motivasi;
- b) tujuan akhir;
- c) lingkungan perbuatan.

Motivasi adalah hal yang diinginkan oleh pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Jadi, motivasi itu dikehendaki secara radar sehingga menentukan kadar moralitas perbuatan. Sebagai contoh, kasus pembunuhan dalam keluarga:

- a) yang diinginkan pembunuh adalah matinya pemilik harta yang berstatus sebagai

pewaris;

- b) sasaran yang hendak dicapai adalah penguasaan harta warisan;
- c) motivasi perbuatan adalah salah dan jahat.

Untuk tujuan akhir adalah diwujudkannya perbuatan yang dikehendaki secara bebas. Moralitas perbuatannya ada dalam kehendak perbuatan itu menjadi objek perhatian kehendak, artinya memang dikehendaki oleh pelakunya. Sebagai contoh ialah kasus pembunuhan dalam keluarga:

- a) perbuatan yang dikehendaki dengan bebas (tanpa paksaan) adalah membunuh;
- b) diwujudkannya perbuatan tersebut terlihat pada akibatnya yang diinginkan pelaku, yaitu matinya pemilik harta (pewaris);
- c) moralitas perbuatan adalah kehendak bebas melakukan perbuatan salah dan jahat.

Berkaitan dengan dua unsur motivasi yang terdapat pada moralitas, maka unsur lingkungan perbuatan adalah segala sesuatu yang secara aksidental mengelilingi atau mewamai perbuatan. Termasuk dalam pengertian lingkungan perbuatan adalah"

- a) manusia yang terlibat;
- b) kualitas dan kuantitas perbuatan;
- c) cara, waktu, tempat dilakukannya perbuatan;
- d) frekuensi perbuatan.

Bertitik tolak dari pendapat mengenai pengertian lingkungan perbuatan di atas, maka keempat komponen tersebut menurut penulis sangat tepat. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan, kualitas dan kuantitas, frekuensi serta cara, waktu dan tempat dilakukannya perbuatan merupakan titik kunci manusia melakukan aktivitasnya. Dalam artian, keempat komponen merupakan faktor pendorong bagi motivasi diri manusia untuk melakukan perbuatan yang bermuara pada tumpuan moral. Tapi karena manusia mempunyai keterbatasan, kelemahan, seperti berbuat khilaf, keliru, kesalahan, maka tidak mustahil suatu ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah sosial yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak stabil, yang perlu dipulihkan kembali. Untuk menegakkan ketertiban dan menstabilkan keadaan, diperlukan sarana pendukung, yaitu organisasi masyarakat dan organisasi Negara. Dalam bidang hukum, organisasi masyarakat itu dapat berupa organisasi profesi hukum yang berpedoman pada kode etik. Dalam bidang kenegaraan, organisasi masyarakat itu adalah Negara yang berpedoman pada Undang-undang (hukum positif). Melalui organisasi tersebut diharapkan dapat dipulihkan ketertiban dan kestabilan dalam masyarakat.

Dari perkembangan profesi hukum yang ada di Indonesia sekarang, kita melihat bahwa profesi hukum dimasa kini jauh lebih maju dibandingkan profesi hukum dimasa lampau. Tidak dapat dihindari bahwa semua profesi khususnya yang terkait dengan hukum sangat dibutuhkan, seperti :kepolisian, Kejaksaan, kehakiman, notaris, dan advokat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, membuat kebutuhan akan jasa hukum semakin meningkat. Begitu juga dengan meningkatnya permasalahan dalam masyarakat, baik publik maupun privat. Mengakibatkan kebutuhan akan seorang advokat juga semakin tinggi. Kode etik mengenai Advokat itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghambat kemandirian profesi, yang punya kewajiban mulia atau terpuja (*officium nobile*). Sebaliknya, kode etik Advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi

namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, Negara atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. (kode etik yang disahkan 23 mei 2002).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa fungsi Kode Etik Advokat dalam masyarakat?
2. Bagaimana cara menegakkan kode etik profesi advokat?
3. Apa saja yang menjadi kelemahan Kode Etik Advokat?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Beberapa Pengertian Tentang Advokat dan Kode Etik Profesi**

#### **2.1.1 Pengertian Advokat**

Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*) . Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilaku kurang terhormat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan menurut Kode Etik Advokat Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Dalam hal ini, seorang advokat selain memberikan bantuan hukum di dalam pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela, atau menjalankan kuasa demi kepentingan klien, juga dapat memberikan bantuan hukum diluar pengadilan, berupa konsultasi hukum, negosiasi maupun dalam hal pembuatan perjanjian kontrak-kontrak dagang serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

#### **2.1.2. Pengertian Kode Etik Profesi**

Hingga saat ini masih ditemui bermacam-macam definisi tentang Kode etik profesi. Namun demikian umumnya mempunyai maksud dan pengertian yang sama. Menurut "Bertens", kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Kode etik profesi Advokat merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat Advokat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Kode etik profesi Advokat dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik.

## 2.2. Syarat-syarat Menjadi Advokat

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, untuk dapat menjadi seorang Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Bertempat tinggal di Indonesia
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat
8. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
9. Berprilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 2 dan 3 UU tentang Advokat, maka seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat (*admission to the bar*). Dengan diangkatnya seseorang menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat.

## 2.3. Fungsi dan Peranan Advokat

Secara garis besar fungsi dan peranan advokat, sebagai berikut:

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
2. Memperjuangkan hak asasi manusia;
3. Melaksanakan Kode Etik Advokat;
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas);
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat;
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
8. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun secara internasional;
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi advokat;
10. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat<sup>Â</sup> yang terhormat (*officium nobile*);
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;



12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi advokat;
13. Member pelayanan hukum (*legal services*), nasehat hukum (*legal advice*), konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*) dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
14. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
15. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan *pro bono publico*).
16. Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Advokat pada prinsipnya mempunyai peran penting karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan Negara melalui institusi hukumnya.

Dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum, advokat mempunyai kode etik sebagai norma yang mengarahkan atau memberi petunjuk bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Untuk mewujudkan Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, haruslah ada peran serta dari pemerintah, serta semua kalangan masyarakat khususnya peran serta dari setiap individu.

## 2.4. Kewajiban-Kewajiban Advokat

### 1. Kewajiban advokat kepada masyarakat

Seorang advokat tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan public, bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian. Dengan diangkatnya seorang advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat (*mobile Officium*), dengan hak eksklusif:

- a. Menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat;
- b. Dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya;
- c. Menghadap dimuka siding pengadilan dalam proses perkara kliennya.

Akan tetapi, jangan dilupakan bahwa hak dan kewenangan istimewa juga menimbulkan kewajiban advokat kepada masyarakat, yaitu:

1. Menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi advokat yang selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat;
2. Bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat ini.

Kewajiban advokat kepada masyarakat tersebut di atas, Bagian dari kewajiban advokat kepada masyarakat, adalah telah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam KEAI Pasal 3 dinyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat menolak dengan alasan kedudukan social orang yang memerlukan jasa hukum dan didalam Pasal

4 kalimat: mengurus perkara cuma-cuma, telah tersirat kewajiban ini. Dan asas ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI alinea 8: kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu. Meskipun di Indonesia telah ada lembaga-lembaga yang membantu kelompok ekonomi lemah ini, khususnya dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH atau yang serupa) dan Biro Bantuan Hukum (BBH atau yang serupa), namun kewajiban advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap diutamakan.

## 2. Kewajiban advokat kepada pengadilan.

Seorang advokat (*counsel*) adalah seorang pejabat pengadilan (*officer of the court*) apabila dia melakukan tugasnya di pengadilan. Oleh karena itu seorang advokat harus mendukung kewenangan (*authority*) pengadilan dan menjaga kewibawaan (*dignity*) sidang. Untuk memungkinkan keadaan ini, maka advokat harus patuh pada aturan-aturan sopan santun (*decorum*) yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya dan menunjukkan sikap penghargaan profesional (*professional respect*) kepada hakim, advokat lawan (atau jaksa/penuntut umum), dan para saksi. Dalam hal kewajiban advokat kepada pengadilan, ABA canon 22 menyatakan bahwa perilaku advokat di muka sidang pengadilan dan dengan para teman sejawatnya harus bercirikan keterbukaan (*candor, frankness*) dan kejujuran (*fairness*). Inti dari asas ini adalah melarang advokat berperilaku curang (*mislead, deceive*) terhadap (majelis) hakim dan advokat lawannya. Memang kewajiban advokat mempunyai dua sisi: dia berkewajiban untuk loyal (setia) pada kliennya, tetapi juga wajib beritikad baik dan terhormat dalam berhubungan dengan pengadilan. Yang pertama adalah *the duty of fidelity* kepada kliennya dan ini belum ada dalam Pasal 4 KEAI tentang hubungan (advokat) dengan klien. Kewajiban kepada pengadilan tersebut di atas adalah *the duty of good faith* dan *the duty of honorable dealing*. bertindak menangani perkara.

## 3. Kewajiban advokat kepada sejawat profesi

Bab IV KEAI mengatur asas-asas tentang hubungan antar teman sejawat advokat. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha, maka persaingan adalah normal. Namun persaingan (*competition*) ini harus dilandasi oleh sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai (KEAI Pasal 5 alinea (1)). Apalagi dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering antara para advokat, atau advokat dan jaksa/penuntut umum, terjadi pertentangan (*contest*). Sering pula advokat terbawa oleh rasa-marah (*ill-feeling*) antar klien mereka, Kejadian seperti ini harus dicegah. Masalah lain dalam hubungan antar advokat ini adalah tentang penggantian advokat. Advokat lama berkewajiban untuk menjelaskan pada klien segala sesuatu yang perlu diketahuinya tentang perkara bersangkutan. Di sini perlu diperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 4 alinea 2 KEAI tentang pemberian keterangan oleh advokat yang dapat menyesatkan kliennya.

Advokat baru sebaiknya menghubungi advokat lama dan mendiskusikan masalah perkara bersangkutan dan perkembangannya terakhir. Yang perlu diperhatikan advokat baru adalah, bahwa klien telah benar-benar mencabut



kuasanya kepada advokat lama dan klien juga telah memenuhi kewajibannya pada advokat lama (lihat alinea 5 dan 6, Pasal 5 KEAI). Hal yang tidak boleh dilakukan seorang advokat adalah berkomunikasi atau menegosiasi masalah perkara, langsung dengan seseorang yang telah mempunyai advokat, tanpa kehadiran advokat orang yang bersangkutan.

#### 4. Kewajiban advokat kepada klien.

Advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium mobile*) dan mendapat kepercayaan penuh dari klien yang diwakilinya. Hubungan kepercayaan ini terungkap dari kalimat *the lawyer as a fiduciary* dan adanya *the duty of fidelity* para advokat terhadap kliennya. Akibat dari hubungan kepercayaan dan kewajiban untuk loyal pada kliennya, maka berlakulah asas tentang kewajiban advokat memegang rahasia jabatan (lihat Pasal 4 alinea 8 KEAI).

Seorang advokat wajib berusaha memperoleh pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya tentang kasus kliennya, sebelum memberikan nasihat dan bantuan hukum. Dia wajib memberikan pendapatnya secara terus terang (*candid*) tentang untung ruginya (merus) perkara yang akan dilitigasi dan kemungkinan hasilnya. Dalam canon 8 ABA ini dinamakan *duty to give candid advice*. Sedang dalam KEAI diperingatkan agar advokat tidak ... memberikan keterangan yang menyesatkan dan tidak menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang (Pasal 4 alinea 2 dan 3)

Salah satu tugas utama dari seorang advokat adalah menjaga agar dirinya tidak menerima kasus dari klien yang menimbulkan pertentangan atau konflik kepentingan (*conflicting interest*). Kewajiban untuk loyal kepada klien berakibat bahwa advokat dilarang (*forbids*) menerima perkara yang akan merugikan kepentingan kliennya (*forbids the acceptance in matters adversely affecting any interest of the client*). Pasal 4 alinea 8 KEAI mengatur tentang kewajiban advokat memegang rahasia jabatan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antar advokat dan klien.

### 2.5. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengamanatkan bahwa salah satu syarat menjadi advokat adalah dengan mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan lulus ujian advokat. Dalam rangka menyiapkan advokat yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang hukum, maka sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2003 setiap calon advokat wajib mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat

## **PEMBAHASAN**

### **3.1. Fungsi Kode Etik Advokat**

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip professional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban professional anggota lama, baru, atau calon anggota kelompok profesi.

Menurut Sumaryono Kode Etik Profesi dibuat tertulis, karena mempunyai 3 fungsi: Sebagai sarana control social, Sebagai pencegah campur tangan pihak lain, Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan control melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi. Pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok advokat melaksanakan kewajibannya. Kode etik advokat dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik advokat yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok advokat sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

### **3.2. Cara Penegakkan Kode Etik Advokat**

Penegakan kode etik advokat adalah hal yang menjadi sorotan banyak orang dan seluruh elemen penegak hukum di Indonesia. Penegakan kode etik diartikan sebagai kemampuan komunitas advokat dan organisasinya untuk memaksakan kepatuhan atas ketentuan-ketentuan etika bagi para anggotanya, memproses dugaan terjadi pelanggaran kode etik dan menindak anggota yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya. Untuk tetap mempertahankan kualitas para anggotanya, sebuah organisasi advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual para anggotanya agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat. Proses ini dikenal sebagai *Proses Continuing Legal Education (CLE)*. Program CLE yang dilakukan secara konsisten oleh organisasi advokat diharapkan akan tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang baik pula. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, memiliki pendirian yang teguh, berpihak kepada keadilan dan kebenaran serta tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

### **3.3. Kelemahan Kode Etik Advokat**

Semua yang tergambar didalam kode etik advokat adalah perilaku yang baik, tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan-kelemahan, sebagai berikut:

1. Idealisme yang terkandung dalam kode etik advokat tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan.(Prof. Abdulkadir Muhammad)
2. Kode etik advokat merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran.
3. Tidak berfungsinya Dewan Kehormatan advokat yang diatur dalam pasal 10 kode etik advokat Indonesia(KEAI) dan pasal 26-27 UU No.18 tahun 2003 tentang advokat, tidak akan efektif baik di pusat maupun daerah karena sangat diragukan ada pihak yang melaporkan advokat yang telah melanggar kode etik.
4. Budaya advokat di Indonesia bisa disebut juga sebagai budaya Solidaritas Korps yang bermakna luas sebagai semangat untuk membela kelompok atau korpsnya. Hal-hal diatas inilah yang bisa menjadi sebuah alasan mengapa kode etik advokat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Advokat merupakan Profesi Terhormat ( *Officium Nobile*), yang dalam menjalankan profesinya bersifat Bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Guna menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan.

Dalam melaksanakan profesinya seorang Advokat memiliki aturan atau norma yang harus dipatuhi yaitu berupa Kode Etik. Kode etik Advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, Negara atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri.

Namun pelaksanaan Kode Etik ini tidaklah sesuai dengan kenyataan, karena seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dengan keterlibatan advokat dalam mafia peradilan, menandakan bahwa kode etik profesi advokat tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan juga menandakan rendahnya moralitas para advokat dan juga menjauhkan advokat dari sebutan profesi terhormat dan mulia (*officium nobile*).

Untuk tetap mempertahankan kualitasnya profesi Advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat. Dilakukan secara konsisten agar tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang baik dan mulia. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, memiliki pendirian yang teguh, berpihak kepada keadilan dan kebenaran serta tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Suhrawardi K. Lubis, S.H., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, thn.2000
- Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006
- Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, 2003
- Supriadi, S.H., M.Hum. *Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, 2006
- Sudikno Mertokusumo, 1986, Profesi dan pendidikan hukum, makalah disajikan pada Temu Ilmiah Mahasiswa Notariat Indonesia di Kaliurang;
- Sudikno Mertokusumo, dan A.Pitlo, 1993, Bab-bab tentang penemuan hukum, PT Citra Aditya Bakti
- Undang-Undang Tentang Advokat, UU No.18 Tahun 2003. Kode Etik Advokat Indonesia.
- Bertens. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sumaryono,E. *Etika Profesi Hukum dan Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: PT.Kanisius